

# INTERAKSI MASYARAKAT KOTA AMBON PASCA KONFLIK 25 APRIL 2004 (SUATU KAJIAN KONFLIK)

*Post-Conflict April 25, 2004 Public Interaction in Ambon  
(A Conflict Review)*

Husin Wattimena<sup>1</sup> dan Nanang Pamuji Mugasejati<sup>2</sup>

*Program Studi Ketahanan Nasional*

*Minat Utama: Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik  
Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada*

## ABSTRACT

The social conflict occurring in Moluccas, and particularly in Ambon city, on January 19, 1999 and April 25, 2004 have had some bearing on public interaction in different public living aspects in Ambon. Their thoroughly effects were mainly in economic, political, cultural and cross-religion aspects, between natives (both Moslems and non Moslems) and migrants, migrants and non Moslems as well as between Moslems in general and non Moslems (protestant, catholic and others) in the Ambon city.

In economic aspect, it focused on the public living interaction of the sellers in *mardika*, *batumerah* traditional markets, as well as the *batugajah* and *batu gantung* incidental markets, regarding sales relationship, such as market area control, income level, sellers jealousy. In political aspect, it included government policy on relocating the refugees resulted from both conflict and FKM-RMS separating movement. The cultural aspect concentrated on the *pela-gandong* culture regarding the background, significance and system, and the function. In addition, the cross-religion aspect focused on the attitude and response of the prominent figures of religions and community, the city transport drivers, as well as the community in general. The above aspects became the triggering factors and the root of such interaction gap of the Ambon community, and reflected a latent conflict.

Seeing such condition of the community, it would be necessary to make a conflict transformation by regulating economic center for sellers, regulating transport current for city transport of *armada*, empowering cultural, public, and region prominent figures as well as empowering the religion and cultural institutions. Besides, it would be desired that the fair law enforcement should be applied by state institutions in line with this problem. It should manifest public edification to create dynamic interaction, targeting a formation of the safe, peaceful and tranquil community of the Ambon city.

**Keywords :** *latent conflict, conflict transformation, interaction*

1. STAIN Ambon

2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

## PENGANTAR

Konflik sosial yang terjadi di daerah Maluku umumnya dan kota Ambon pada khususnya bersumber dari konflik pribadi yang merupakan kasus kriminal biasa, seperti yang dikutip dari harian Suara Maluku tanggal 21 Mei 1999 bahwa konflik itu bermula dari "perkelahian antara seorang supir angkot Nursalin bin Kadir beragama Islam dan Yopie Leuhery seorang kondektur yang beragama Kristen pada tanggal 19 Januari 1999 di terminal darurat Batu Merah kota Ambon."<sup>1</sup>

Kondisi sebagaimana yang penulis kemukakan di atas menjadi pemicu konflik dan meluas ke seluruh kota Ambon, bahkan Maluku secara umum. Konflik ini telah menghancurkan sistem hubungan masyarakat yang telah terbentuk secara baik sejak dulu dan mengkotak-kotakan ikatan masyarakat dalam kultur baru berdasarkan etnis, agama dan golongan. Padahal mulanya mereka adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma hukum dan norma adat yang menjadi karakter budaya orang Maluku. Norma yang dipegang tersebut terbentuk dalam ikatan-ikatan masyarakat adat yang disebut dengan *adat pela-gandong*.

Konflik ini juga berpengaruh kepada hubungan interaksi sosial komunitas umat beragama di kota Ambon. Menurut Sumarjan "Interaksi dapat menjurus kepada arah menyenangkan atau bisa menyusahkan, tergantung kepada kondisi yang menyebabkan terjadinya interaksi tersebut. Syarat umum untuk terciptanya hubungan positif interaksi dan kesenangan adalah kondisi saling menambah keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak yang terlibat dalam proses interaksi".<sup>2</sup>

Kehidupan ini muncul bersamaan dan berakhirnya masa konflik, yang menimbulkan pembunuhan, pembakaran fasilitas umum maupun pribadi yang dimiliki, hingga akhirnya berpengaruh terhadap hubungan sebagai umat beragama, secara personal manusianya maupun secara struktural kelembagaan. Akibatnya hubungan umat beragama menjadi renggang, melahirkan sikap kecemburuan, dendam dan trauma. Sikap dimaksud diartikan sebagai suatu kesenjangan interaksi sosial yang terbawa dalam empat aspek kehidupan masyarakat kota Ambon:

1. Aspek ekonomi yang menyoroti interaksi masyarakat pedagang di pasar Mardika, Batumerah dan pasar-pasar kaget di kota Ambon.
2. Aspek budaya yang menyoroti adat pela-gandong dengan fungsionalisasinya bagi masyarakat Maluku dan khususnya kota Ambon.
3. Aspek Politik, yang menyoroti kebijakan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dalam merelokasikan masyarakat di kota Ambon akibat konflik, termasuk gerakan separatistis FKM-RMS yang turut

memainkan perannya pada konflik di Maluku termasuk kota Ambon sendiri.

4. Aspek hubungan antar umat beragama pasca konflik Maluku di kota Ambon.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji secara mendalam interaksi atau hubungan timbal balik antar komunitas masyarakat yang bertikai di Kota Ambon sejak pasca konflik tanggal 25 April 2004. Analisa penelitian akan didekati dari dua segi, *pertama* internal para individu maupun komunitas masyarakat yang bertikai. *Kedua*, segi eksternal individu-individu yang bertikai, yakni lingkungan psikologis sosial, budaya, ekonomi, politik dan hubungan antar umat beragama yang tidak memiliki kesadaran multi kultural, hingga mendorong mereka berperilaku cemburu, dendam, fanatisme suku dan agama yang semu. Hal itu terjadi disebabkan oleh adanya factor-faktor pemicu. Untuk memahami hubungan interaksi masyarakat tersebut digunakan berbagai pendekatan multidisipliner dalam ilmu-ilmu sosial, yakni psikologi sosial, sosiologi, ekonomi dan politik

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan lapangan. Studi kepustakaan berguna untuk mendapatkan berbagai teori yang dapat mempertajam pisau analisis melalui teori-teori ilmu sosial yang berkaitan dengan tingkah laku individu dan kelompok masyarakat, sistem sosial, ekonomi, politik dan hubungan antar umat beragama yang mempengaruhi interaksi atau hubungan timbal balik masyarakat yang mengalami kesenjangan.

Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam, atas dasar daftar pertanyaan yang telah dibuat (*depth interview guide*) dengan beberapa individu dan kelompok masyarakat yakni ; pakar-pakar ilmu sosial, pejabat pemerintah sipil, kepolisian, pemuka adat (raja-raja) dan agama, juga para masyarakat sipil yang terdiri dari pedagang pasar, supir angkot, penduduk yang direlokasi tempat tinggalnya, baik yang beragama Islam maupun Kristen, yang pribumi maupun pendatang.. Hal ini dimaksud untuk melihat hubungan korelasi tentang faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kesenjangan interaksi di kalangan masyarakat dan mengakibatkan degradasi nilai (*value*) dalam hubungan interaksinya.

Kesenjangan dimaksud, terdapat pada empat aspek disertai variabel yang menjadi faktor pemicu konflik, sebagaimana yang penulis kemukakan sebelumnya. Hal ini membutuhkan tindakan preventif secara persuasif dan solusinya melalui pendekatan kultural, religius, dan upaya

hukum terhadap masyarakat, misalnya melalui tokoh-tokoh agama, masyarakat, adat yang disegani dalam masyarakat. Keinginan ini ditempuh sebagai solusi yang tepat untuk membangun kembali hubungan interaksi ke arah yang lebih baik, dengan cara penataan sentra - sentra ekonomi, arus transportasi, pemberdayaan tokoh, lembaga adat dan lembaga agama serta penegakan hukum di tengah masyarakat.

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik:

1. Observasi atau pengamatan, guna menginformasikan keakuratan data yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara mendalam dengan para pedagang pribumi, pendatang (kelompok etnik), sebagian masyarakat yang beragama Islam, Kristen, sopir angkot, tokoh masyarakat, agama Islam, Kristen dan tokoh adat (raja-raja) termasuk di dalamnya pejabat instansi pemerintah, minimal camat-camat yang ada di wilayah kota Ambon serta melihat langsung ke obyek sasaran.
2. Kuesioner berupa daftar pertanyaan yang telah dirumuskan secara sistematis masalah-masalah penelitian yang meliputi interaksi dalam aspek politik, ekonomi, budaya dan hubungan antar umat beragama.
3. Wawancara mendalam (*indepth interview*), teknik ini digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dengan merujuk pada daftar pertanyaan atau yang ada dalam daftar pertanyaan dari responden, tokoh adat (raja-raja), tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagian masyarakat dari komunitas yang bertikai.

Data yang dikumpulkan dianalisa secara kualitatif, dan dikaji secara mendalam dan seksama atas hasil penelitian yang diperoleh. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif diskriptif eksploratif, yakni melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait; tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat (raja-raja), sebagian masyarakat dari komunitas agama Islam dan Kristen yang bertikai dalam wilayah kota Ambon.

Sumber data yang digunakan adalah, data primer, yang diperoleh langsung dari hasil observasi, melalui daftar pertanyaan dan wawancara yang mengacu kepada daftar pertanyaan yang ditujukan kepada komunitas masyarakat yang bertikai ; Islam, Kristen, etnik, pedagang, sopir angkot, pemerintah kota Ambon, Dewan Perwakilan Daerah, tokoh agama, tokoh adat (raja-raja), termasuk pihak kepolisian daerah serta pihak-pihak yang berkaitan dengan proses interaksi (hubungan timbal balik) dimaksud dalam hal perdagangan, kebijakan relokasi yang dilakukan oleh pemerintah, sentimen (dendam) antar umat beragama, sistem adat pela-gandong yang berlaku di kota Ambon. Penguasaan pasar

oleh kelompok masyarakat pendatang disertakan pendapatan yang mereka peroleh yang menimbulkan kecemburuan masyarakat kota Ambon pribumi serta tanggapan dari mereka tentang solusi yang terbaik bagi penyelesaian kesenjangan interaksi yang terdapat pada komunitas-komunitas tersebut.

Data sekunder, yakni data kepustakaan dalam hal kesenjangan interaksi (hubungan timbal balik) antar kelompok masyarakat yang disebutkan pada sumber data primer yang terkait dengan aspek ekonomi, politik, budaya, dan hubungan antar umat beragama yang bersumber dari buku dan tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan masalah konflik sosial beserta aspek-aspek tersebut untuk dipergunakan bagi pengkajian secara teoritis.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Aspek Ekonomi**

Keberadaan ekonomi masyarakat kota Ambon yang pluralistik, pada pasca konflik 25 April 2004, telah menimbulkan kecemburuan pedagang pribumi dan masyarakat pribumi secara umum, baik Islam maupun Kristen terhadap pedagang sekaligus masyarakat pendatang, serta terciptanya perasaan takut, dendam maupun trauma antar komunitas Islam dengan non Islam, di mana hal ini menjadi faktor pemicu konflik yang bersifat laten (tersembunyi).

Sikap kecemburuan, trauma dan dendam di kalangan mereka yang merupakan pemicu konflik pada aspek ekonomi, disebabkan oleh penguasaan areal pasar mardika dan batumerah, tingkat pendapatan pedagang pendatang yang lebih baik, serta peristiwa pembakaran, pembunuhan yang terjadi di masa konfrontasi konflik tanggal 19 Januari 1999 termasuk tanggal 25 April 2004. Hal ini dimaknai konflik kepentingan, karena antara pedagang pendatang, pribumi dan non Islam memiliki kesamaan atau tindakan untuk bersaing. Ketiganya memiliki substansi kepentingan yang sama berkeinginan menguasai areal pasar dan keuntungan yang sebesar-besarnya pada pasar. Secara psikologi ketiga belah pihak yang ada sama-sama memiliki sikap ingin menguasai dan menerima resiko apapun yang terkait dengan persaingan yang terjadi diantara mereka.

Secara struktural APKLI merupakan lembaga informal penghimpun para pedagang pasar, telah melakukan tindakan yang inkonstitusional dengan tidak menyampaikan retribusi pajak pasar kepada pihak Pemda kota Ambon, namun pajak yang diterima dikelola sendiri. Di sisi lain, para pedagang pasar turut terbebani pajak yang ditarik oleh pihak Pemda

mengakibatkan beban pajak mereka semakin berat. Terhadap hal ini, dimaknai sebagai suatu konflik struktural, karena pola pendistribusian pajak pasar yang dilakukan oleh pihak APKLI, menimbulkan konflik struktural dengan Pemda kota Ambon, dan berefek kepada hubungan yang tidak harmonis antara APKLI dengan Pemda, maupun komunitas para pedagang pasar. Terlepas dari konflik kepentingan maupun konflik struktural, pihak pedagang, Pemda dan APKLI sama-sama memiliki kepentingan yang sama, dengan menjadikan areal pasar sebagai nilai yang diperebutkan untuk mendapatkan keuntungan, dan sikap ini menjadi cerminan konflik nilai.

Sehubungan dengan kepentingan di atas, oleh J.W. Ajawaila dkk, dalam seminar proposal pemecahan masalah konflik di kota Ambon, mengemukakan bahwa "kontak sosial yang terjadi antara orang pribumi sebagai anak negeri dengan orang pendatang hanya dimotivasi oleh kepentingan ekonomi"<sup>3</sup>

Kondisi ini memperlihatkan sebagian masyarakat kota Ambon ( para pedagang, Pemda, dan masyarakat umum ) tengah mengalami kehidupan yang ambivalen dalam hubungan interaksinya, karena terkooptasi oleh pemikiran dan sikap yang penuh antipati.

Terkooptasinya pemikiran dan sikap ingin menguasai areal pasar melahirkan kecemburuan etnis oleh pihak APKLI dan pedagang non Islam, selaku pedagang pribumi terhadap tingkat kehidupan ekonomi pedagang pendatang yang lebih baik dibandingkan pribumi, dan menjadi pemicu konflik pada aspek ekonomi, tepatnya pada kalangan masyarakat pasar. Ini merupakan suatu sikap *meniru* untuk mendapatkan sesuatu (*mimesis*) dari kalangan orang pribumi dengan satu anggapan (*stereotype*) terhadap orang pendatang yang lebih banyak menguasai pasar sekaligus aspek ekonomi secara umum di kota Ambon.

Pemikiran masyarakat yang antipatif seperti ini melahirkan kehidupan yang tidak harmonis (*konflik*), dan kondisi ini berpengaruh terhadap hubungan berbagai aspek, yang merubah masyarakat secara *physic* dalam arti sikap saling tidak percaya, dan secara *physic* terjadi kemandekan hubungan interaksi diantara mereka.

### Aspek Politik

Aktivitas separatis FKM-RMS di kota Ambon-Maluku menjadi *inspirator* sekaligus *konspirator konflik* yang terjadi pada tanggal 25 April 2004. Dikatakan demikian, oleh karena pada masa *konfrontasi konflik* terjadi, merupakan akibat dari aktivitas para kelompok separatis ini melakukan peringatan HUT kemerdekaannya yang ke 46 di kota Am-

bon, Bagi kelompok masyarakat yang tidak menghendaki keberadaan organisasi separatist dimaksud, merasa terganggu atas kegiatan yang dilakukan, karena beralasan bahwa kota Ambon merupakan wilayah yang telah menjadi bagian integral dari kedaulatan negara kesatuan RI.

Gerakan memperingati HUT kemerdekaan RMS pada tanggal 25 April 2004 tersebut merupakan manifestasi mereka untuk menghendaki suatu kemerdekaan pada wilayah yang telah memiliki kedaulatan, dan kegiatan ini dianggap sebagai sikap merongrong negara yang sah baik wilayah maupun kekuasaannya. Dengan demikian, sikap antipati yang dilakukan gerakan demonstrasi masyarakat kota Ambon menentang kegiatan FKM-RMS tersebut menimbulkan sikap-sikap arogansi yang berakibat munculnya *konflik* baru pada tanggal 25 April 2004.

Demonstrasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak menghendaki adanya keberadaan gerakan FKM-RMS ini *terakumulasi* bersamaan dengan sikap dendam, trauma atas tindakan kekerasan yang terjadi pada masa *konfrontasi konflik* tanggal 19 Januari 1999 yang tentunya merupakan *konflik laten* bagi mereka yang mengalami akibat dari konflik tersebut. Dengan demikian menimbulkan tindak kekerasan yang mengakibatkan jatuh korban diantara masyarakat.

Di sisi lain, akibat *konflik* yang terjadi, pemerintah merelokasi pemukiman penduduk masyarakat kota Ambon di dua wilayah pemukiman penduduk. Dalam kenyataannya, *relokasi* yang dilakukan terkonsentrasi di wilayah pemukiman Islam dan non Islam. Hal ini tanpa disadari, dengan *relokasi* yang seperti ini telah menciptakan kesenjangan hubungan diantara mereka, karena menimbulkan kelambanan dalam hal berinteraksi dan komunikasi.

Kesenjangan ini terjadi, karena sikap kehati-hatian, takut, trauma dan diselimuti dendam di antara mereka dengan suatu *stereotype* bahwa kedua kelompok komunitas yang ada telah menjadi kelompok yang saling bermusuhan. Akibatnya kondisi menjadi *konflik laten*.

Suasana masyarakat di kota Ambon yang terkondisikan menjadi *konflik laten* seperti yang penulis kemukakan. Menurut pandangan Leopold van Wiese dan Howard Becker, keadaan ini merupakan bentuk proses yang kontroversi yakni "sikap mental yang tersembunyi terhadap orang-orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Sikap tersembunyi tersebut berubah menjadi kebencian, akan tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian"<sup>4</sup>

Pandangan van Wiese dan Becker atas kondisi yang terjadi pada masyarakat di kota Ambon *pasca konflik*, yang menurut Simon Fhiser dkk, dibutuhkan adanya suatu *transformasi konflik* bagi mengubah struktur

masyarakat yang penuh antipati ke arah hubungan *interaksi* yang lebih baik, dengan meningkatkan jalinan hubungan yang baik di antara pihak-pihak yang berkonflik, mengembangkan proses dan sistem masyarakat menuju *rekonsiliasi* di antara mereka”<sup>5</sup>

Kondisi masyarakat kota Ambon yang tercipta dalam viksi-viksi yang dilatarbelakangi oleh keberadaan mereka yang terpisah, menjadikan hubungan interaksi mereka mengalami tersendat-sendat, seperti yang digambarkan oleh pandangan van Wiese. Terhadap kondisi yang demikian, oleh penulis sependapat dengan Simon Fisher, bahwa bagi masyarakat kota Ambon seperti ini, dibutuhkan adanya transformasi konflik dengan mengubah struktur masyarakat yang ada ke suatu hubungan yang lebih baik, penuh harmonis dengan meningkatkan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakomodir kelompok masyarakat yang berkonflik sebagai manifestasi rekonsiliasi antar masyarakat dan menjadi wujud usaha mempertemukan keinginan pihak yang berkonflik mencapai suatu persetujuan dalam menyelesaikan atau mengakhiri konflik diantara mereka.

Kebijakan relokasi pemukiman masyarakat kota Ambon akibat konflik oleh pemerintah merupakan *refleksi* kebijakan yang ditempuh sebagai *aktualisasi* tugas selaku lembaga negara yang *dimanifestasikan* dalam bentuk kegiatan yang nyata bagi kepentingan masyarakat. Di sisi lain gerakan separatis FKM-RMS yang dimunculkan oleh sekelompok masyarakat merupakan sikap arogansi yang dihadapkan kepada pemerintah sebagai wujud ketidakpuasan masyarakat, meskipun gerakan itu dianggap telah melangkahi sistem dan undang-undang yang berlaku.

Kedua masalah di atas menjadi tugas sekaligus kewajiban pemerintah secara struktural berfungsi untuk menanganinya. Dari gambaran ini Pierre Bourdieu menempatkan masalah tersebut pada posisi tugas politik,” di mana kebijakan dan gerakan tersebut saling terkait, serta memberikan kekuatan dan peran sebagai kekuatan mobilisasi, dan mobilisasi ini sendiri merupakan penguasaan kekuatan yang memungkinkan suatu gagasan dari mekanisme politik untuk dapat terwujud.”<sup>6</sup>

### Aspek Budaya

Adat *pela-gandong* yang merupakan budaya Maluku termasuk kota Ambon, akhir-akhir ini telah memiliki ketidakberdayaan fungsi. Menurut penulis hal ini disebabkan oleh rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap budaya tersebut dan keterbatasannya dalam mengikat



masyarakat pribumi itu sendiri maupun masyarakat pendatang (migran) di kota Ambon. Ketidakberdayaan dan keterbatasannya itu menimbulkan ekses terhadap hubungan interaksi mereka. Menurut Roy. J. Lewicki, "pada umumnya konflik akan terjadi di mana saja sepanjang ada interaksi atau hubungan antar sesama manusia dalam melakukan sesuatu, baik antara individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok"<sup>7</sup>

Gambaran Lewicki di atas, dibuktikan pada masa *konfrontasi konflik* terjadi di kota Ambon tahun 1999. Gubernur Maluku selaku penguasa darurat sipil daerah saat itu, menghimbau agar ada kebijakan penghentian *konflik* dengan menggunakan pendekatan budaya *pela-gandong*, dengan alasan *pela-gandong* merupakan tradisi masyarakat Maluku yang dapat mempengaruhi massa yang sedang dalam konfrontasi. Akan tetapi kebijakan melalui himbauan itu tidak digubris. Hal ini menunjukkan budaya *pela-gandong* kini telah mengalami degradasi nilai yang tadinya mengandung makna sakral dan pengikat mereka, tetapi kenyataannya *pela-gandong* tidak mampu meleraikan dan menghentikan konflik yang terjadi saat itu, dan konflik tetap terus *berekskalasi* ke seluruh wilayah Maluku sampai saat ini dan menjadi *konflik laten* di kalangan masyarakat"<sup>8</sup>

### Aspek Hubungan Antar Umat Beragama

Pada tataran lembaga keagamaan maupun lembaga adat yang ada di kota Ambon sama-sama memiliki kelemahan dalam mengantisipasi gejala yang muncul sebagai pemicu konflik. Bagi penulis, hal ini disebabkan mereka masih sama memiliki keberpihakan terhadap komunitasnya masing-masing. Selain itu, kelemahan ini diletakkan oleh ketidakjujuran mereka dalam meleraikan dan upaya penghentian konflik antar masyarakat. Sikap ketidakadilan dalam meleraikan, maupun berupaya menghentikan konflik yang terjadi, berpengaruh terhadap perilaku umat pengikutnya dan turut terbawa arus kehidupan para tokoh adat, masyarakat dan tokoh agama yang apatis, tidak memiliki keberanian untuk menentang keradikalan masyarakat dalam menghadapi kondisi masa konfrontasi konflik, jika sewaktu-waktu akan terjadi.

Pasca konflik 25 April 2004 di kota Ambon yang dianggap telah reda dan menunjukkan titik terang bagi perbaikan kehidupan masyarakat, masih saja ada hal-hal kecil yang tetap menghantui dan mengganggu kestabilan masyarakat itu. Meskipun telah dilakukan perbaikan kehidupan ekonomi, hubungan sosial antar umat beragama, budaya dan kehidupan politik di tengah masyarakat. Akan tetapi secara psikologis masyarakat masih terganggu oleh gerakan-gerakan kecil dari sekelompok

masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan anarki yang dapat mengganggu kestabilan kondisi yang ada.

Kondisi seperti ini bagi penulis, masih belum pulih sepenuhnya bagi standar suatu kehidupan yang adil dan damai dalam masyarakat. Hal yang demikian, karena masih terdapat gerakan-gerakan yang dimunculkan di tengah masyarakat sebagai suatu sikap protes terhadap pemerintah yang dilatar belakangi oleh sikap ketidak puasan masyarakat terhadap penyelesaian hukum atas peristiwa 19 Januari 1999 maupun 25 April 2004 yang tidak dibuktikan secara hukum atas kasus-kasus pidana tertentu, yang merupakan akibat atau eksekusi dari kedua peristiwa dimaksud. Berkaitan dengan tidak tertanganinya penyelesaian kasus-kasus pidana yang terjadi saat konfrontasi konflik berlangsung, bagi penulis, mestinya ada ruang gerak bagi penyelesaian keseluruhan kasus itu dengan solusi alternatif yang harus ditempuh, agar kasus-kasus seperti ini tidak akan lagi terulang pada pasca konflik saat ini dengan langkah-langkah solusi alternatif sebagai berikut :

1. Penegakkan hukum sesuai prosedur hukum yang diatur dalam semua ketentuan undang-undang negara harus dijalankan, tanpa ada rasa simpati dan empati terhadap siapapun, agar benar-benar dapat ditegakkan kepastian hukum bagi setiap orang yang mencari suatu keadilan hukum di negara.
2. Rekonsiliasi yang telah berjalan di kalangan masyarakat secara baik, harus didukung dengan pengamanan yang ketat, serta jangan melakukan upaya-upaya yang dapat memancing sikap dendam, amarah masyarakat, dengan membangkitkan opini yang mengarah kepada dendam dan amarah sebagaimana yang terjadi pada masa konfrontasi konflik berlangsung.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

*Pertama*, interaksi sebagian masyarakat kota Ambon pasca konflik 25 April 2004, dalam aspek ekonomi, secara struktural, maupun horisontal masih bersifat simbolis, karena masih diselimuti oleh rasa kecurigaan kecemburuan, dendam dan trauma, bersifat (*konflik laten*). Hubungan yang ada tidak pada tingkat struktur sosial dan tingkat budaya yang bernilai norma dan pandangan hidup yang sebenarnya, akan tetapi hanya pada tingkat individual yang subyektif dan interpersonal yang simbolis, dimana interaksi mereka hanya bersifat individual dengan pola dan jaringan yang berdasarkan atas perilaku yang subyektif, dalam arti untuk mengejar kepentingan nilai ekonomi (tingkat pendapatan ekonomi) yang diinginkan dari hasil hubungan interaksi tersebut.

*Kedua*, hubungan interaksi dalam aspek budaya (*pela-gandong*) telah mengalami degradasi nilai, dari bersifat kultural religius melemah menjadi bersifat simbolik, karena rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap budaya itu dan keterbatasannya dalam mengikat masyarakat pribumi (Islam dan non Islam) maupun pendatang (*migran*). Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pada aspek budaya (ikatan *pela-gandong*) pola dan jaringan interaksi masyarakat di kota Ambon pasca konflik 25 april 2004 tidak pada tingkat struktur sosial dan tingkat budaya yang bernilai norma dan pandangan hidup yang mengikat keseluruhan lapisan masyarakat sebagaimana makna ikatan persahabatan dan persaudaraan dari adat *pela-gandong* tersebut. Akan tetapi interaksi yang ada, hanya pada tingkat individual yang subyektif dan interpersonal yang simbolis. Dalam arti hubungan mereka hanya bersifat adaptasi, atau penyesuaian timbal-balik yang dimotivasi oleh faktor hubungan agama dan etnik sesuai keragaman suku yang ada di kota Ambon, serta didasarkan atas ikatan *pela-gandong* yang terbatas dan simbolis.

*Ketiga*, dalam aspek politik, hubungan interaksi masyarakat kota Ambon masih bersifat simbolis karena dihantui oleh arogansi sekelompok orang Maluku dengan gerakan separatis FKM-RMSnya. Sebaliknya pemerintah juga lambat mengatasi gerakan tersebut. Termasuk relokasi pemukiman masyarakat pengungsi akibat konflik yang dilaksanakan oleh pemerintah juga telah mensegregasikan mereka kedalam lingkungan pemukiman berdasarkan komunitas Islam dan non Islam., Kedua masalah tersebut menimbulkan kesenjangan interaksi di antara mereka. Dengan demikian menimbulkan sikap kecurigaan yang negatif diantara mereka, dendam serta trauma untuk berinteraksi. Hal ini sangatlah berpengaruh terhadap kestabilan keamanan di kota Ambon.

*Keempat*, tingkat hubungan interaksi antar umat beragama di kota Ambon masih mengalami kesenjangan dalam arti bersifat konflik laten, karena dipengaruhi oleh rasa dendam dan trauma atas konflik yang merenggut nyawa manusia dan harta benda diantara masyarakat, baik pada konflik 19 Januari 1999 maupun tanggal 25 April 2004. Hubungan yang ada hanya pada tingkat individual yang subyektif dan interpersonal yang simbolis, di mana tindakan interaksi antar individu hanya pada pola dan jaringan interaksi yang didasarkan atas perilaku (*behavioral*) yang subyektif, bukan pada tingkat struktur sosial dan budaya. Interaksi yang ada hanya didasarkan atas ketergantungan yang simbolik, dalam arti ketergantungan dan komunikasi serta adaptasi yang hanya didorong oleh faktor kepentingan yang temporer, hanya mengejar kebutuhan sesaat, bukan pada tatanan norma dan nilai budaya orang Maluku yang pluralistik agamis.

### Saran-saran

*Pertama*, terhadap konflik laten di bidang ekonomi bagi sebagian masyarakat yang ada di kota Ambon, dibutuhkan adanya transformasi konflik dengan upaya mengubah struktur dan kinerja mereka dalam dunia usaha dengan mengembangkan dan meningkatkan hubungan interaksi secara baik, melalui pemberdayaan dan peningkatan mutu usaha masyarakat. Adanya penegasan aturan hukum terhadap mereka yang melanggar ketentuan yang diatur oleh pemerintah daerah, sehingga tercipta jalinan sosial ekonomi, baik secara struktural kelembagaan non pemerintah maupun pemerintah sendiri guna tercapainya tingkat ekonomi yang adil dan merata.

*Kedua*, solusi yang harus ditempuh bagi perbaikan dan pengembangan hubungan mereka dalam aspek budaya adalah, melalui suatu transformasi budaya antar masyarakat pribumi (Islam dan non Islam), maupun masyarakat pendatang (migran) dengan mengintensifkan kegiatan-kegiatan budaya daerah secara akulturasi, merujuk kepada fenomena yang timbul ketika kelompok-kelompok individu yang berbeda budaya berhubungan langsung dan seimbang, melalui kegiatan-kegiatan bernilai budaya daerah, antara lain; panas pela, bergotong royong membangun rumah ibadah, makan patitah yang melibatkan semua komponen masyarakat, baik yang beragama Islam, non Islam maupun pendatang (migran).

*Ketiga*, hendaknya ada penegakan hukum terhadap mereka yang terlibat gerakan separatis FKM-RMS di Maluku dengan upaya yang tegas dan keras, jika terdapat gerakan-gerakan yang disengaja maupun yang dilakukan secara terang-terangan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Menciptakan kegiatan-kegiatan yang bernilai agamis dan kultural guna mempertemukan mereka, serta penanggulangan masalah yang menjadi kebutuhan ekonomi sebagai solusi bagi terintegrasinya masyarakat yang direlokasi akibat konflik, tanpa ada rasa ketimpangan, perbedaan diantara mereka.

*Keempat*, hendaknya ada solidaritas yang ditanamkan di tengah masyarakat kota Ambon, dengan suatu kebijakan pemerintah, lembaga adat, lembaga agama dengan memberdayakan lembaga-lembaga tersebut sesuai fungsinya masing-masing, melalui suatu aturan hukum (peraturan daerah) yang dapat mengikat mereka tanpa ada perbedaan antara yang beragama Islam, non Islam, migran maupun pribumi.

## CATATAN KAKI

<sup>1</sup> "Sidang Kasus Mursalin bin Kadir dan Yopy Leuhery", *Suara Maluku*, 21 Mei 1999, 1, 9

<sup>2</sup> Soekanto Soemarjan. *Fungsionalisme dan Teori Konflik Dalam Perkembangan Sosiologi*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 23

<sup>3</sup> [Http//www.fice.org/hr/id.proposal](http://www.fice.org/hr/id.proposal) Pemecahan Kerusuhan Ambon, 13.html

<sup>4</sup> Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 104

<sup>5</sup> S N Kartikasari, dkk. *Mengelola Konflik Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, "The British Council Indonesia", Jakarta, 2001, hal. 9

<sup>6</sup> Haryatmoko. "Etika Politik dan Kekuasaan", *Kompas*, Jakarta, 2003, cet I, hal. 7

<sup>7</sup> Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 24

<sup>8</sup> Yusran Yusuf, *Prasangka Beragama Implikasi Sosial di Ambon Atas Relasi Keberagamaan di Indonesia*, PT Penamadani, Jakarta, 2004, cet I, hal..244-245

## DAFTAR PUSTAKA

Kartika Sari S. N. dkk., Penyunting. 2000. *Mengelola Konflik Ketrampilan Dan Strategi Untuk Bertindak*, Penerbit The Britesh Council Indonesia, Cet. I. Jakarta.

Suaidi, Asyary. 2003, *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*, INIS dan PBB Leiden, Seri 41, Jakrta

Emirzon, Joni. 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Yusuf, Yusran. 2004, *Prasangka Beragama Implikasi Konflik Sosial di Ambon Atas Relasi Keberagamaan di Indonesia*, PT Penamadani, cet I, Jakarta

Soekanto, Soerjono. 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Haryatmoko. 2003, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Kompas, Cet I, Jakarta

Indrianto, A.Maria. 2003, "Perangkat Pembangun Perdamaian", Kanisius, Jakarta  
*Suara Maluku*. "Mursalin Ungkap Fakta Baru di Persidangan", 21 Mei 1999: 1,8

*Sinar Harapan*. "Penyelesaian Konflik Ambon Melalui Pendekatan Budaya Akar Rumpun", *Sinar Harapan.com*. 30 September.2002:[http//www.SinaraHarapan.co.id/berita/0209/30/opi01.html](http://www.SinaraHarapan.co.id/berita/0209/30/opi01.html)